

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak awal perjalanannya identik dengan keberagaman. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dan etnisitas, sub-kultur, serta bahasa lokal yang jumlahnya ratusan (Maarif et al., 2010). Tidak adanya etnis tunggal (dominan) di Nusantara membuat proses menuju *nation-state* melibatkan semua kelompok. Mereka adalah kelompok yang dianggap pribumi maupun pendatang, karena sejak awal kehidupannya berlangsung di tanah Nusantara seperti para pendatang dari Utara, China daratan, Jazirah Arab dan India. Semua kekuatan yang meskipun memiliki banyak perbedaan, namun mampu menyatukan diri dalam satu garis perjuangan melawan penjajah. Secara formal Indonesia sebagai *nation state* berdiri ketika kemerdekaan yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945 (Budiman, 1999).

Momen tersebut merupakan akumulasi dari perjuangan bersama semua kelompok di Nusantara. Sejak 1908 para elit yang memelopori perjuangan kemerdekaan telah menyadari bahwa Nusantara memiliki keberagaman, baik suku, agama, maupun ideologi. Maka pada tahun itu muncul kesadaran untuk menyatukan semua elemen bangsa dalam *Boedi Oetomo*—sebuah gerakan yang menjadi cikal-bakal lahirnya “monumen kebangsaan” Sumpah Pemuda 1928 (Deanur, 2021). Hal ini untuk menghentikan politik penjajah *divide et impera* [politik pecah belah] yang mengakibatkan konflik antar kelompok, sehingga melemahkan perjuangan kemerdekaan.

Salah satu kelompok etnis yang terlibat dalam proses berbangsa adalah etnis Arab Hadrami. Jika menilik sejarah, awal mula kedatangan komunitas Arab Hadrami dimulai pada awal Islamisasi di Nusantara oleh para pedagang Arab (Aribowo, 2017). Sejumlah literatur mencatat, orang-orang Arab Hadrami mulai datang secara bergelombang pada abad ke-7 Masehi. Alasan utama dari migrasi besar ini karena terjadi dinamika politik yang memaksa mereka untuk berpindah ke tempat yang baru. Dimulai dari kalangan Sayyid Alawiyyin yang pertama kali tiba

di Nusantara. Sayyid Alawiyin merupakan keturunan Nabi Muhammad melalui Fathimah dan Ali bin Abi Thalib. Keluarnya Sayyid dari Yaman (Hadramaut) kala itu—pertengahan abad ke-8 dan 9 Masehi, dimana kalangan Sayyid menjadi target konflik melalui kebijakan yang dibuat oleh Dinasti Bani Umayyah dan Abasiyah (Sehabudin, 2015). Keputusan itu diambil karena kalangan Sayyid dikhawatirkan menjadi ancaman politik di masa depan.

Keberadaan orang-orang Arab Hadrami di Nusantara terkonfirmasi dalam catatan seorang biksu asal Tiongkok yakni I-Tsing. Ia menulis para perantau Arab banyak berperan dalam bidang sosial dan keagamaan di Nusantara. Salah satunya dapat dilihat dengan hadirnya desa-desa Arab di sepanjang pantai timur Sumatera (Marwati & Nugroho, 1992). Awalnya, sebagian besar orang Arab yang tiba di Nusantara hanya untuk berdagang. Mereka mengamati Selat Malaka yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional yang akan terhubung langsung ke wilayah Arab-India-Cina. Menariknya, dari perjalanan besar tersebut, mayoritas pedagang Arab yang merantau ke Indonesia adalah pria. Mereka datang tidak membawa keluarga oleh karena itu setibanya di Nusantara mereka melakukan pernikahan dengan penduduk asli Indonesia (Jayana, 2021).

Fase ini menuju satu fenomena yang dinamakan dengan golongan “Arab Peranakan”, yaitu para keturunan Arab hasil perkawinan silang dengan warga Indonesia. Pernikahan ini tak hanya membawa keluarga baru, melainkan juga pengaruh pada kebudayaan. Selain itu masyarakat keturunan Arab Hadrami juga membangun lembaga pendidikan yang lazim disebut madrasah, dimana hampir semua *santri*-nya merupakan keturunan Sayyid/Syarifah. Lembaga pendidikan ini yang kemudian diketahui akan menghasilkan golongan yang dikenal dengan sebutan Habaib. Seiring berjalannya waktu, orang-orang pribumi menyebut pendatang keturunan Arab sebagai *akhwal* atau “paman”. Hal ini karena dipengaruhi fenomena sosiologis orang Arab Hadrami banyak yang melangsungkan pernikahan dengan masyarakat pribumi (Cipta, 2020).

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, komunitas Arab Hadrami mendirikan dua lembaga pendidikan penting, yaitu Jamiat Al-Khairiyyah atau Jamiat Kheir dan Al-Irsyad. Meskipun Al-Irsyad pada dasarnya mengikuti gaya

pendidikan Jamiat Kheir, Al-Irsyad lebih memilih pola pendidikan yang terbuka. Al-Irsyad mempertahankan prinsip toleransi dalam proses pendidikan dan penerapan toleransi. Hal ini diperkuat ketika Al-Irsyad mulai membuka peluang untuk anggota baru dan pelajar yang bukan dari Hadrami, seperti penduduk atau pribumi asli yang diterima untuk turut belajar dan menjadi pemimpin cabang regional/daerah Al-Irsyad (Malik, 2019).

Perbedaan orientasi antara tanah air ke Hadramaut, Yaman atau Indonesia terus menjadi perdebatan di antara komunitas Arab di Indonesia. Kaum tua pada umumnya berpendapat bahwa loyalitas dan orientasi kesetiaan harus ditujukan pada tanah nenek moyangnya di Hadrami. Sementara itu, kaum muda melihat bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Pada akhirnya kaum muda yang lebih banyak mengambil peran dan memperjuangkan orientasi nasionalis mereka. Hingga lahir Sumpah Pemuda Arab pada 1934 yang sekaligus menjadi puncak diskursus integrasi orang Arab-Hadrami. Baik perbedaan perlakuan dari penjajah maupun di internal mereka sendiri. Perlakuan yang berbeda itu secara internal berupa pergeseran topik yang didiskusikan seperti sayyid dan non-sayyid menjadi totok dan peranakan (De Jonge, 2019).

Momen Sumpah Pemuda Arab pada 1934 mempertegas Indonesia adalah tanah air orang Arab-Hadrami. Orang-orang keturunan Arab juga merupakan putra-putri bangsa Indonesia dan harus pula mengabdikan dirinya untuk tanah air. Pemuda Arab menghadapi tekanan-tekanan dari kolonial Belanda dengan bangkit dan memproklamkan keyakinan dan sikapnya (Baswedan, 1974). Gerakan ini menjalar dengan cepat, tidak hanya di Jawa tetapi juga di berbagai pulau termasuk Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Ini menunjukkan mereka berkomitmen bahwa Indonesia adalah tanah airnya. Pada periode tahun 1908-1920 bangsa Indonesia mulai mewacanakan kesadaran kolektif sebagai benih spirit kebangsaan Indonesia. Dimana semua kelompok etnis mendapatkan tantangan untuk membuktikan kadar kecintaan dan kontribusinya dalam pembentukan *nation state* atau negara bangsa (Suwirta, 2015).

Ketidaktahuan atau pengalaman buruk yang dialami sekelompok orang menjadikan anggapan dan pembenaran bagi gerakan “anti Arab”. Ujaran-ujaran

rasisme belakangan muncul terhadap etnis keturunan Arab, khususnya habaib (Alhabsyi, 2022). Dimana menurut Alhabsyi ujaran itu salah sasaran karena 0,01% atau sekitar 300 orang (habaib) luput dari “serangan” karena berada pada lindungan para pengikutnya. Pada tahun 2019 misalnya, terlontar pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengenai keturunan Arab untuk tidak melakukan provokasi revolusi. Pernyataan tersebut diklarifikasi bahwa ia (Hendropriyono) perlu mengingatkan keturunan Arab banyak yang dihormati di tengah masyarakat. Jadi sebaiknya tokoh organisasi Front Pembela Islam (FPI) yaitu Habib Rizieq Shihab dan Yusuf Martak tidak menyerukan atau melakukan hal yang bertentangan dengan konstitusi (Sutrisno, 2019). Statemen lain yang pernah dilontarkan oleh tokoh publik lainnya adalah: “Bahwa Tuhan Bukan Orang Arab”. Akibat statemennya ini Dudung Abdurrahman yang notabene adalah seorang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad TNI) (Utami, 2022).

Selain itu, ketegangan serta friksi masyarakat dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 antara Basuki T. Purnama (Ahok) dengan Anies Baswedan menghadirkan residu dan sisa-sisa potensi konflik yang melibatkan isu identitas etnis Arab. Isu keturunan etnis Arab beragama Islam yang melekat pada Anies dinilai menjadi bahan kampanye untuk mendapatkan dukungan dalam Pilkada Ibukota dan berdampak negatif. Fakta-fakta tersebut menjelaskan ada asumsi bahwa etnis Arab Hadrami diragukan kontribusinya dalam proses berbangsa.

Ketegangan atau stigma yang muncul terhadap kelompok etnis Hadrami dapat kita telusuri melalui penelaahan sejarah bangsa. Proses pembentukan Indonesia sebagai bangsa terjadi pada tahun 1920-an melalui kiprah intensif dari Perhimpunan Indonesia (PI) (Maarif et al., 2010). PI adalah organisasi mahasiswa Indonesia dari berbagai etnis yang belajar di Belanda. Bangsa Indonesia sudah mulai mengakui pentingnya Pergerakan Nasional Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme (Jayadi, 2024).

Momen puncak persatuan bangsa Indonesia terlihat pada Kongres Pemuda I hingga lahirnya Sumpah Pemuda. Mochammad Tabrani memimpin Kongres

Pemuda yang berlangsung dari 30 April hingga 2 Mei 1926. Sementara, Soegondo Djojopoespito memimpin hasil Kongres Pemuda Pertama pada 28 Oktober 1928 (Sitanggang et al., 2024). Berbagai organisasi pemuda, termasuk *Jong Minahasa*, *Jong Java*, *Jong Ambon*, *Jong Islamieten Bond*, *Paguyuban Pasundan*, Boedi Oetomo, mengirim perwakilan ke Kongres Pemuda. Selain kelompok-kelompok pribumi, tercatat Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) dan kelompok pemuda keturunan Arab adalah dua organisasi lain yang berpartisipasi dalam Kongres Sumpah Pemuda (Cipta, 2020).

Kehadiran pemukim Eropa (Belanda) juga mempromosikan penciptaan nasionalisme kebangsaan, yang sebelumnya kurang diminati oleh kerajaan Nusantara. Fenomena ini tidak hanya umum di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara dunia ketiga lainnya. Penjajahan oleh Barat pada akhirnya mendorong pembentukan negara-negara baru, yang memperkenalkan isu-isu baru ke dalam sistem politik (Hidayat et al., 2024). Negara bangsa adalah ide yang kemudian diusulkan sebagai solusi untuk masalah politik dan ekonomi yang dihadapi. Akibatnya, orang-orang didorong untuk membangun entitas budaya dari berbagai tradisi budaya etnis, yang dikenal sebagai bangsa (Thompson, 2017).

Kemampuan mengatasi tantangan perbedaan identitas antarkelompok, termasuk suku dan agama, menjadikan Belanda khawatir dengan percepatan integrasi nasional (Indonesia) sebagaimana yang terjadi dalam momen Sumpah Pemuda. Bertolak dari sana, penjajah akhirnya merilis salahsatunya berupa jurus propaganda berupa stigmatisasi ke etnis tertentu, termasuk stigma “Bahaya Arab”. Gerakan “anti Arab” pada masa kolonial juga dapat ditemukan melalui tulisan yang terbit dalam Berita *Nahdlatul Oelama (NU)* pada 1 Januari 1938 tepatnya di halaman 2 hingga 4 berjudul “Aliran Anti Arab”. Artikel itu menyoroti kelompok-kelompok yang dianggap anti Arab. Pihak yang dapat dipastikan sebagai kelompok ini adalah mereka yang tidak menginginkan kemesraan terjadi antara pribumi dan Arab, yaitu penjajah Belanda (Al-Fattah, 2020). Kaum penjajah juga menerapkan pengelompokan sosial, dimana para keturunan Arab dan Tionghoa ditempatkan di level dua, di atas penduduk pribumi (Haidar & Ali, 2014).

Politik pecah-belah tersebut dimaksudkan untuk membatasi integrasi sosial dan meredam nasionalisme Indonesia. Segregasi tersebut juga diperkuat melalui pemberlakuan distrik tempat tinggal (Hayaze', 2021a). Meskipun orang Arab-Hadrami dalam politik kolonial ditempatkan pada peringkat kedua, mereka tetap dianggap tidak penting atau berarti secara politis bagi pemerintah Belanda. Selain lembaga pendidikan, komunitas Arab juga memiliki peran di bidang lainnya. Kebangkitan Hadrami ditandai dengan hadirnya institusi modern berupa organisasi sosial, lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah dan yang terakhir adalah surat kabar (Kesheh, 2007).

Setelah kemerdekaan hingga masa yang panjang di bawah Orde Baru, eksistensi kelompok Hadrami terjaga, meskipun mereka tidak lagi mengekspresikan keunikan kelompoknya dalam bendera yang khusus, sebagaimana Partai Arab di masa lalu. Hal ini terjadi karena dua hal, pertama, integrasi sosial antara Hadrami dan penduduk lokal terjadi secara alami dan tidak mengalami konflik berarti. Kedua, Orde Baru menerapkan kontrol yang ketat dalam politik lokal, sehingga tidak ada ruang baru kelompok etnis ataupun agama untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka. Setidaknya tidak sedinamis pada Pemilu 1955 (Orde Lama), dimana simbol-simbol kultural masih diberikan ruang dalam perjuangan politik. Sebaliknya selama pemilu Orde Baru, fusi partai terjadi. Partai yang semula berjumlah puluhan menjadi hanya tiga partai saja, yang semuanya relatif "dikendalikan" pemerintah (Hamdani, 2012). Barulah saat Orde Baru berakhir, digantikan dengan Era Reformasi 1998 pemerintah melakukan transformasi besar-besaran dalam demokratisasi dan memberi ruang kepada semua kelompok (Dewi, 2024).

Demokratisasi didefinisikan sebagai penerapan konsep atau prinsip-prinsip demokratis terhadap segala tindakan atau kegiatan politik negara. Tujuannya adalah untuk mendorong kehidupan politik yang mempromosikan demokrasi. Proses transisi ke bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi juga mengacu pada proses memperkuat norma-norma demokratis untuk secara bertahap mengembangkan sistem politik yang terbuka. Prinsip-prinsip demokrasi dianggap bermanfaat dan positif oleh setiap warga negara (Winarno, 2006). Walaupun

demikian, tantangan kembali muncul seiring banyaknya kelompok yang ingin terlihat berada di “panggung depan” dalam waktu bersamaan. Akibatnya politik nasional yang selama era Presiden Suharto “tenang” dan “terkendali”, sejak reformasi menjadi lebih dinamis. Komunitas Arab Hadrami juga memiliki momen “panggung” sosial-politik lagi di masyarakat, ditandai dengan banyaknya forum pengajian yang terbentuk, dengan pemimpinnya masing-masing (Rijal, 2020a).

Panggung baru dimaksud tidak lagi hanya di politik praktis, melainkan di bidang agama (dakwah) dan sosial. Indikatornya bisa dilihat dengan menjamurnya pengajian atau majelis zikir pasca reformasi tidak hanya dipimpin oleh para Habaib. Terdapat juga ulama-ulama yang menginisiasi gerakan serupa. Majelis zikir merupakan wadah keagamaan non formal yang memerankan fungsi pengembangan sistem nilai juga norma-norma Islam (Mustamin & Rahman, 2016). Salah satu contohnya adalah Majelis Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Habib Mundzir Al-Musawwa, Majelis Dzikir Al-Fauz pimpinan Muhayat (Kepala Badan Pengelola Jakarta Islamic Centre) DKI Jakarta. Fenomena majelis zikir tersebut sangat menarik diamati dengan karakter yang khas dengan corak ragam kebudayaan di masing-masing daerah (Dedi, 2022).

Khusus majelis pengajian yang dikaitkan dengan habaib, di Jabodetabek saja jumlahnya mencapai puluhan. Diantaranya Majelis Rasulullah, Majelis Nurul Habib, Majelis Habib Ali Bin Yahya, Majelis Kwitang, Majelis Ta'lim Abu Bakar Alatas, Majelis Nurul Iman, Majelis Nurul Mustofa (Rijal, 2020). Lalu di Jawa Timur ada Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan, Tuban yang cukup populer. Di Jawa Tengah terdapat Majelis Sholawat Kanzus Pekalongan, dan sebagainya. Berkaca dari berkembangnya dakwah habaib pasca reformasi, dapat ditarik benang merah bahwa itu juga terkait dengan kebijakan pemerintah dan suasana politik di sekitarnya. Di samping majelis-majelis habaib di atas yang fokus pada zikir dan pengajian, terdapat pula beberapa habaib yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Sebagian lainnya memilih jalan berbeda, dengan bersikap kritis. Meski tidak di politik praktis, namun kehadiran dan menguatnya peran habaib pasca reformasi tak lepas dari pengaruh politik. Misalnya saat 1998, TNI membentuk PAM Swakarsa, untuk membantu pengamanan Sidang Istimewa (SI) MPR RI.

Merujuk penelitian Institut Studi Arus Informasi (ISAI) tahun 2000, PAM Swakarsa ditopang oleh salah satu tokohnya yaitu Habib Rizieq yang merupakan salah satu Habaib populer di Jakarta (Sulaksono, 2017). Pasca SI, Habib Rizieq dan pengikutnya membentuk Front Pembela Islam (FPI).

Jika Habib Rizieq memilih jalan kritis ke pemerintah, maka sebagian besar habaib yang lain justru berdakwah dengan membantu pemerintah. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2004-2014 bahkan salah satu Habib menjadi Dewan Pembina Majelis Dzikir Nurussalam. Majelis ini diasuh oleh salah satunya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al Habsyi, atau dikenal sebagai Habib Kwitang. Habib Ali meninggal pada 2018, dimana SBY juga datang untuk bertakziah. SBY saat itu menyatakan, dirinya mengingat dan terkenang akan masa-masa rutin berdzikir bersama Habib Kwitang di Masjid Baiturrahim, kompleks Istana, juga di Cikeas. SBY menyebut Habib Kwitang sebagai panutan umat dari Majelis Dzikir Nurussalam (Nugraha, 2018). Perlu diketahui, di masa pemerintahan SBY, Majelis Dzikir Nurussalam memiliki akses untuk melakukan zikir rutin di Istana Negara setiap malam Jumat. Selain itu zikir juga sering kali dilakukan di Cikeas, rumah pribadi SBY (Rosa, 2014).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2024, ia juga menunjukkan gestur dekat dengan habaib. Meski sebelumnya kebijakannya keras ke FPI dan Habib Rizieq—termasuk ke ulama-ulama yang mengkritik pemerintah—namun Presiden Jokowi mengimbangnya dengan kedekatan dengan Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dari Pekalongan. Tak hanya hubungan informal, Jokowi bahkan menjadikan Habib Luthfi sebagai Anggota Dewan Penasehat Presiden (Wantimpres), yang tugasnya adalah memberi masukan dan saran ke Presiden (Kholis et al., 2020). Habib Luthfi bahkan tampil dalam Kirab Bendera saat Jokowi banyak mendapat kritik karena kebijakannya yang keras ke kelompok-kelompok tertentu. Saat itu Habib Luthfi juga mendoakan Jokowi agar Presiden diberi kekuatan *zohiron wa batinan* [lahir dan batin] dalam memimpin bangsa ini (Alfian, 2022). Para tokoh Habaib baik yang dianggap berseberangan maupun yang seiring dengan kekuasaan memiliki pola masing-masing yang khas dalam kehidupan bernegara. Habaib yang merupakan tokoh agama menunaikan

tugasnya dalam berdakwah namun di sisi lain juga menunjukkan interaksinya dengan negara ataupun tokoh-tokoh negara.

Kajian relasi antara agama dan negara yang hingga kini masih menjadi sebuah diskursus menarik. Paling tidak terdapat tiga bentuk pemikiran mengenai hubungan agama dan negara (Syadzali, 1993). Pertama, golongan yang meyakini bahwa Islam adalah agama paripurna yang mampu menjawab semua hal, termasuk persoalan negara maupun sistem politik. Tokoh utama aliran ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, dan yang paling keras pendapatnya adalah Abu al-A'la al-Maududi. Kedua, pendapat bahwa Islam tidak membahas secara khusus tentang negara karena Islam tidak mengatur fungsi negara atau pemerintah. Menurut aliran ini, secara historis, wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah daerah risalah yang tidak dikombinasikan dengan urusan pemerintahan. Thaha Husein dan Ali Abd Raziq adalah pemikir yang terkenal dari pendapat ini. Aliran ketiga, menentang gagasan bahwa Islam mencakup segalanya, serta gagasan bahwa Islam hanya membahas hubungan manusia dengan Penciptanya. Pemikiran ini berpendapat bahwa Islam memang tidak berisi segalanya, namun merupakan sekumpulan prinsip-prinsip etis dan cita-cita tentang kehidupan dalam masyarakat, termasuk negara (Butarbutar & Damanik, 2022; M. Iqbal, 2006). Oleh karena itu, dalam masyarakat Islam, setiap individu harus mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dan etika yang luas dan bersumber dari Islam. Muhammad Husein Haikal adalah tokoh yang paling terkenal di aliran ini. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan termasuk dalam aliran pertama dan ketiga. Arus pertama diwakili dalam narasi kehidupan keagamaan di Aceh, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan banyak distrik Jawa. Fanatisme terhadap agama pada masa penjajahan dengan demikian berkembang menjadi teori politik yang mampu mendorong oposisi dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda (M. Iqbal, 2006).

Melihat realitas tersebut, pada masa ke pra Kemerdekaan, Snouck Hurgronje yang merupakan sosiolog Belanda mencoba untuk menguraikan pemikiran Islam yang merupakan inti dari penelitiannya di Aceh. Menurutnya, Muslim di Indonesia damai, tetapi dia menyadari kemungkinan gerakan Islam Politik (Pan Islamisme)

(De Jonge, 2019). Hurgronje berpendapat, musuh kolonialisme adalah Islam sebagai teori atau doktrin politik bukan Islam sebagai agama. Ia tidak membantah bahwa Islam sering merupakan ancaman bagi dominasi Belanda. Ketika dihadapkan dengan problem seperti itu, Hurgronje mengkategorikan Islam sebagai “Ibadah” dari Islam sebagai “kekuatan politik.” Interpretasi Hurgronje dapat diterima, mengingat bahwa administrasi kolonial pada saat itu sibuk dengan Perang Padri, Perang di Aceh dan Perang Diponegoro yang hampir menghabiskan dana kerajaan Belanda (Suminto, 1985). Itulah setidaknya perjalanan sejarah Islam di Indonesia yang penuh dengan warna. Dengan latar perjalanan sejarah tersebut, Habaib dengan kedudukannya yang strategis sebagai tokoh ulama agama Islam menjadi menarik dikaji dalam konteks kehidupan berbangsa.

Pada pemerintahan Joko Widodo salah satu Habaib yang mendapatkan perhatian adalah sosok Habib Luthfi bin Yahya yang juga merupakan sebagai tokoh *thariqah*. Dengan berguru pada ayahnya, Habib Ali al-Ghalib, ia berhasil menjadi seorang ilmuwan agama. Pada tahun 1959, Habib Luthfi bin Yahya memperdalam pemahaman tentang Islam di Pondok Pesantren Benda Kerep di Cirebon, Jawa Barat (Bustomi, 2018). Selain melayani sebagai Rois Aam Jam'iyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (Jatman), Habib Luthfi adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024. Dia juga merupakan anggota dari *Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought*, Yordania, 2019-sekarang, serta pembina dan pendiri Majelis Ta'lim Kanzus Sholawat. Selain itu, Habib Luthfi bin Yahya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dari 2006-2011.

Majelis Kanzus yang diasuhnya merupakan taklim yang berpengaruh di Jawa Tengah. Dalam pengajian setiap Jumat Kliwon yang dilangsungkan di Jl. Dr. Wahidin, Pekalongan, Jawa Tengah tercatat ribuan pengikut dari berbagai daerah di Jawa Tengah hadir sebagai peserta majelis. Selain dapat diikuti secara tatap muka, pengajian disiarkan langsung melalui platform sosial media *YouTube* yang juga menyedot *viewer* yang signifikan. Kanzus sholawat memiliki pengikut yang diklaim mencapai jutaan (Priyatno, 2021). Peneliti dua kali menghadiri pengajian

tersebut dan sempat bertatap muka dengan Habib Luthfi Bin Yahya pada tanggal 23 Agustus 2024.

Di Jawa Timur, terdapat Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan Tuban. Majelis Taklim ini dipimpin oleh Habib Husein bin Hasyim bin Toha Ba'agil. Ulama asal Tuban ini aktif sebagai pendakwah yang diketahui memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di beberapa kesempatan, ia kerap mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) TNI Dudung Abdurrachman. Akun instagram pendakwah muda ini mencapai 232 ribu follower (Husaini, 2022).

Fenomena lain sosok Habaib adalah Habib Rizieq Shihab (HRS), pemimpin organisasi FPI. Organisasi ini dilarang sesuai putusan MK No. 82 PUU 11 / 2013, 23 Desember tahun 2014. Sejak 21 Juni 2019 semua kegiatan FPI tidak lagi mempunyai *legal standing* baik sebagai organisasi masyarakat atau sebagai organisasi (Kemenkopolhukam, 2020). HRS sempat dihadapkan pada masalah hukum chat asusila sehingga bertolak dari Indonesia dan tinggal di Arab Saudi selama 3 tahun (Velarosdela, 2020). Selain menyelenggarakan dakwah dan kajian di Markaz Petamburan, HRS juga memimpin Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Tokoh berikutnya adalah Habib Sayyid Bahar bin Ali Bin Sumaith yang dikenal kontroversial dan sering berurusan dengan hukum mulai dari dianggap menghina Presiden Jokowi Widodo, hingga kasus penganiayaan. Habib Bahar bin Smith disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Pria yang berasal dari Manado dan memiliki darah Buton dari ibunya merupakan pendiri dan pemimpin Majelis Pembela Rasulullah. Ia juga merupakan Pemimpin Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor, Jawa Barat (Muarabagja & Bagaskara, 2023).

Habaib keempat adalah Habib Husein Ja'far yang memiliki profil khas dengan tampilan peci putihnya. Ia dikenal sebagai Habib muda Indonesia yang aktif menyebarkan ajaran Islam melalui berbagai platform media sosial, termasuk YouTube, Instagram, dan TikTok, yang menyasar kelompok muda. Selain berdakwah, Habib Husein adalah seorang penulis. Habib Husein aktif memberikan ceramah di beberapa tempat, termasuk universitas, masjid, dan organisasi pemuda.

Ia kerap diundang untuk berbicara di forum atau seminar yang membahas tema keberagaman dan toleransi.

Fenomena Habib Luthfi, Habib Ba'agil, Habib Rizieq Shihab, Habib Husein Ja'far Al Hadar dan Habib Bahar yang identik sebagai pemimpin agama beretnis Arab menunjukkan bahwa kedua belah pihak (negara dan kelompok etnis Arab di Indonesia) berada pada relasi yang menarik. Negara sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan dalam melangsungkan dan menjaga ritme *nation character building* serta di lain pihak ada kelompok etnis Hadrami yang merupakan etnis tak terpisahkan dari masyarakat Nusantara. Reformasi 1998 mengakibatkan terbukanya ruang berekspresi oleh semua kelompok di masyarakat, termasuk ekspresi dari kelompok etnis Hadrami. Hadrami adalah kelompok yang unik dalam konteks sosial politik Indonesia, ia adalah kelompok etnis yang minoritas secara kuantitatif, tetapi juga merupakan kelompok yang dianggap dekat dengan agama mayoritas di Indonesia yaitu Islam.

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari posisi etnis Hadrami dalam proses *nation character building* di Indonesia bahwa: Pertama, kelompok Hadrami yang sebelum Reformasi 1998 cenderung menjalani pola dakwah secara kultural kini bergeser melalui pelibatan Habaib dalam posisi atau kedudukan di lembaga formal negara. Kedua, pasca Reformasi, muncul tokoh-tokoh Habib Hadrami yang dianggap kontroversial dan disinyalir akan mengganggu identitas dan integrasi sosial masyarakat melalui narasi dakwahnya. Namun disisi lain terdapat Habaib yang dianggap akomodatif dan terlibat aktif dalam jabatan politik formal. Ketiga, masih terdapat stigma bahwa Hadrami adalah kelompok etnis yang eksklusif dan tidak memiliki kontribusi dalam proses *nation character building* bahkan mengancam integrasi sosial.

Urgensi penelitian ini berada pada bagaimana dakwah memiliki arti penting dalam upaya membangun karakter bangsa dan kohesi sosial di Indonesia. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana dakwah para habaib berkontribusi membangun karakter bangsa melalui narasi dakwahnya, khususnya dalam konteks permasalahan multikultural dan dinamika politik pasca Reformasi. Strategi

demokratisasi memfasilitasi keterlibatan kembali banyak kelompok, termasuk habaib, dalam ranah publik.

Studi ini penting untuk menganalisis dan mencari jalan keluar dari problem yang kerap dihadapi masyarakat dengan keberagaman yang tinggi seperti Indonesia, seperti meningkatnya ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu, khususnya yang berasal dari etnis keturunan Arab. Fenomena "anti-Arab" yang muncul pasca-Reformasi, khususnya dalam ranah politik, menggarisbawahi perlunya pemahaman posisi habaib dalam membina kohesi masyarakat. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Habaib mengkonstruksi identitas, orientasi sosial politiknya sebagai warga negara Indonesia keturunan arab, dan memahami pola dakwah yang dilakukan serta menjelaskan bagaimana relasi ideal antara negara dengan habaib. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan sudut pandang baru tentang bagaimana penyebaran nilai-nilai Islam oleh habaib dapat berkontribusi pada *nation character building*. Hal ini sejalan dengan proses pembangunan karakter bangsa, yang merupakan dasar penting bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Dengan latar belakang yang dipaparkan tersebut, judul yang dirumuskan adalah: **HABAIB DAN NATION CHARACTER BUILDING: Studi Fenomenologi Peran Dakwah Habaib Arab Hadrami Di Jawa Pasca Reformasi 1998.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah orientasi sosial-politik dan identitas Habaib Arab Hadrami sejak Reformasi 1998 sehingga dakwahnya dapat berkontribusi pada *nation character building* di Indonesia?
2. Bagaimana pola dakwah sejak Reformasi 1998 yang dilakukan para Habaib Arab Hadrami di Jawa yang berkontribusi pada *nation character building*?
3. Bagaimana relasi ideal antara Habaib dengan Negara dalam proses *nation character building*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis orientasi sosial politik dan identitas Habaib etnis Arab Hadrami Indonesia sejak Reformasi 1998 sehingga dakwahnya berperan dalam *nation character building*.
2. Menganalisis pola dakwah yang dilakukan para Habaib di Jawa sejak Reformasi 1998 yang berkontribusi pada *nation character building*.
3. Menganalisis relasi ideal negara dengan Habaib Etnis Hadrami di Indonesia dalam proses *nation character building*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat di bidang teori dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan maupun secara praktis bagi pihak yang berkepentingan seperti lembaga perumus kebijakan dalam pelaksanaan *nation character building*, pemerintah dan masyarakat. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya pada kajian teori *nation character building*.
2. Sebagai sumber referensi kajian mengenai Etnis Arab Hadrami di Indonesia.
3. Menjadi referensi dan rujukan pada penelitian berikutnya yang mengkaji tentang *nation character building* maupun etnis Arab Hadrami di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga Pembuat Kebijakan

Sebagai sumber referensi stakeholder yaitu Lembaga Ketahanan Nasional RI, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan dalam merumuskan pola dan kebijakan dalam pelaksanaan *nation character building* berbasis peran dakwah Habaib di Indonesia.

Sehingga kebijakan dapat disusun untuk mendukung penghormatan terhadap perbedaan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan alternatif pemikiran dan sikap masyarakat dalam memahami dan menyikapi perbedaan etnis di dalam masyarakat.

3. Bagi Etnis Hadrami di Indonesia

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan penguatan etnis Hadrami dalam kontribusinya merawat nasionalisme dan berperan dalam *nation character building*.

4. Bagi Habaib di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan para habaib untuk memperkokoh kesadaran historis dan identitas sehingga habaib dapat terus berperan melalui dakwah yang kontekstual, inklusif dan adaptif terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan benegara.

1.4.3 Manfaat Bagi Pengambil Kebijakan

1. Penelitian ini dapat membantu pemerintah khususnya Lembaga Ketahanan Nasional RI, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan untuk memahami nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang membentuk identitas nasional. Dengan demikian, kebijakan dapat dirancang untuk memperkuat dan memelihara identitas nasional yang mengakomodir keberagaman etnis.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang pola dakwah yang mendukung pembentukan karakter dan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Kebijakan pembentukan karakter yang terarah dapat membantu membentuk generasi dengan karakter yang kokoh.

1.4.4 Manfaat Segi Isu dan Aksi Sosial

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dalam aksi sosial:

1. Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai proses *nation character building* yang berbasis dakwah sehingga menjadi salah satu referensi bagi pendakwah, pemerintah, masyarakat umum maupun kelompok etnis Arab Hadrami di Indonesia mengenai urgensi keterlibatan pendakwah/ulama dalam *nation character building*.
2. Penelitian ini dapat mendorong peningkatan pemahaman multikultural dan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang keragaman budaya.
3. Penelitian dapat memberikan wawasan tentang akar masalah konflik sosial dan bagaimana membangun pemahaman bersama. Kebijakan yang didasarkan pada penelitian dapat membantu mencegah dan menangani konflik sosial dengan lebih efektif.

1.5 Ruang Lingkup Disertasi

Penulis menyusun ruang lingkup penulisan disertasi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup Disertasi.

BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan Kajian Konseptual seperti etnis hadrami, sejarah masuknya etnis hadrami di Indonesia proses asimilasinya, konsep Habib dan habaib, *nation character building*, *nation building*, nasionalisme, karakter dan pendidikan karakter serta konsep dakwah dan metode dakwah. Kajian Teoritis mencakup teori Fungsionalisme Struktural, Teori Republikan, Teori Integrasi dan Teori Dramaturgi. Penelitian Terdahulu dilakukan terkait kajian yang relevan mengenai *nation character building*, *nation building*, dan kajian terdahulu mengenai Habaib atau Habib serta Kerangka Pemikiran Penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode dan rencana yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu Pendekatan dan Metode Penelitian, Lokasi dan Subjek Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Tahapan Pengumpulan Data, Analisis Data, Validitas dan Reliabilitas Data.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi hasil data atau temuan yang didapatkan dari proses penelitian dan dibagi kedalam empat sub bab yaitu: Lokasi Penelitian dan Deskripsi Penelitian, Orientasi Sosial Politik dan Identitas Habaib, Pola Dakwah Habaib dalam *Nation Character Building*. Masing-Masing subbab diurai lebih rinci untuk menjelaskan lebih detail hasil penelitian. Subbab pertama memaparkan lokasi penelitian dan deskripsi subjek penelitian, subbab kedua memaparkan konstruksi sosial politik dan identitas habaib, isu nasab, pandangan habaib terhadap negara, keterlibatan dalam politik praktis. Subbab ketiga berisi penjelasan pola dakwah Habaib yang menyatukan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan, melalui penguatan karakter seperti cinta tanah air, toleransi, kejujuran, serta penggunaan media dakwah yang adaptif terhadap media konvensional dan digital, seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan TikTok. Subbab keempat memfokuskan pada paparan terkait relasi ideal antara Habaib dan negara.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini diawali penjelasan dalam subbab 5.1 yang membahas orientasi sosial politik dan identitas Habaib, dilanjutkan subbab 5.2 mengelaborasi pola dakwah habaib yang menjadi inti kontribusi mereka dalam membentuk karakter bangsa, dengan tiga fokus utama: narasi nilai-nilai karakter dalam dakwah, tipologi pendekatan dakwah yang seimbang antara ketegasan dan kelembutan serta adaptasi habaib dalam menjaga komunikasi tradisional sekaligus membangun jejaring di era media baru. Terakhir, subbab 5.3 menutup dengan pembahasan mengenai relasi ideal antara habaib dan negara dalam kerangka *nation character building*.

Bab VI Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Diawali paparan subbab 6.1 yang merangkum temuan dan menyajikan simpulan dari seluruh pembahasan disertasi. Dalam subbab 6.2 berisi penjelasan implikasi teoritis dan praktis. Terakhir dalam subbab 6.3 rekomendasi aplikatif disusun untuk pihak Habaib, Masyarakat Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan bagi Peneliti Selanjutnya.